

URGENSI DAN IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS

DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN

KELAPA SAWIT DI PROVINSI JAMBI

Disertasi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Hukum



AGENG TRIGANDA SAYUTI

2230112014

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN
APPROVAL SHEET
No. Reg. : /PSDH/IV/2026

**URGENSI DAN IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN
PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI JAMBI**
**IMPLEMENATION OF THE PRICIPLE OF PROPORTIONALITY IN PALM OIL PLANTATION
MANAGEMENT AGREEMENTS**

Disusun oleh:
Prepared by:

AGENG TRIGANDA SAYUTI
NIM. 2230112014

Program Studi Doktor Hukum
Doctoral Program in Law

Disertasi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Agustus 2026 dan
dinyatakan LULUS oleh tim penguji yang terdiri dari:

*This dissertation was defended before the Board of Examiners on August 27, 2026, and was declared
to have PASSED by the examining committee consisting of:*

Susunan Penguji:

Composition of the Board of Examiners:

1.	Prof. Dr. Ferdi, S.H., M. Hum.	Ketua Sidang <i>Chair of the Examination Panel</i>	
2.	Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.	Ketua PSDH <i>Head of the Doctoral Program in Law</i>	
3.	Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H.	Promotor <i>Promoter</i>	
4.	Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.	Ko-Promotor <i>Co-Promoter</i>	
5.	Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum.	Ko-Promotor <i>Co-Promoter</i>	
6.	Prof. Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D.	Penguji Eksternal <i>External Examiner</i>	
7.	Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.	Penguji <i>Examiner</i>	
8.	Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.	Penguji <i>Examiner</i>	
9.	Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H.	Penguji <i>Examiner</i>	
10.	Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.	Penguji <i>Examiner</i>	

Mengetahui,

Acknowledged by,

Ketua Program Studi Doktor Hukum
Head of the Doctoral Program in Law

Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.
NIP. 197904052005011005

DAFTAR ISI

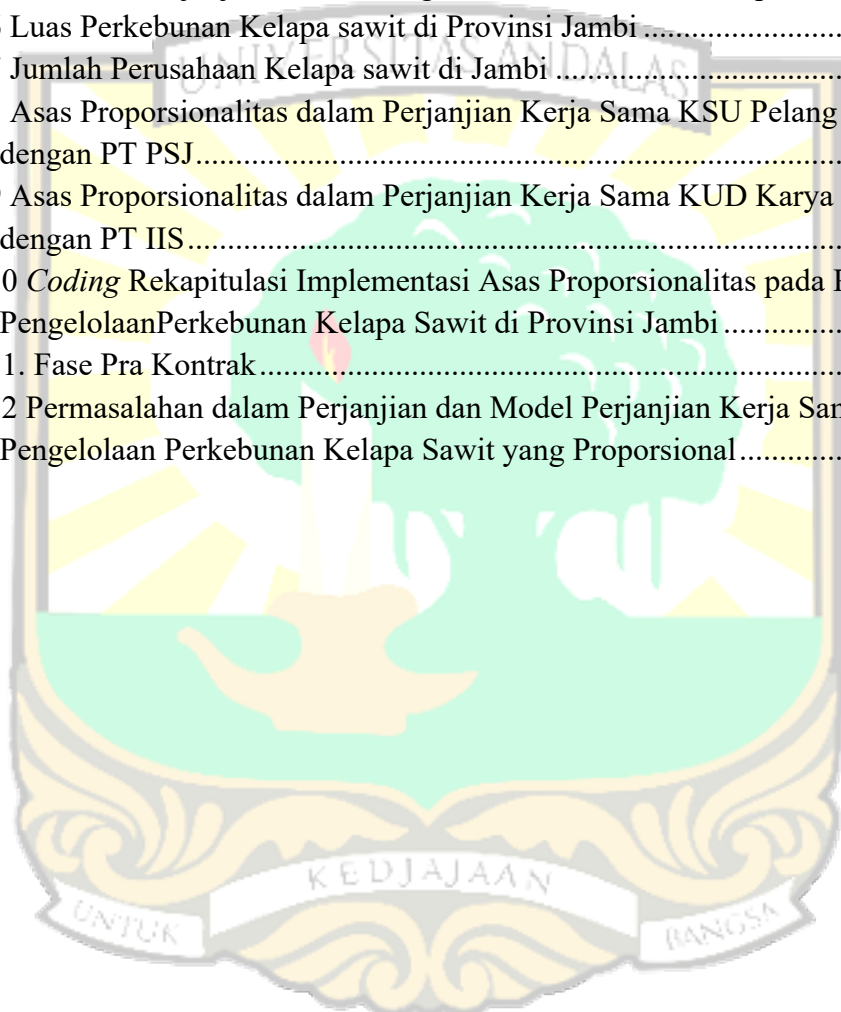
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Keaslian Penelitian.....	24
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	28
1. Kerangka Teoritis	28
2. Kerangka Konseptual	39
G. Metode Penelitian.....	44
BAB II PERJANJIAN DAN POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA.....	52
A. Istilah Perjanjian dan Kontrak.....	52
B. Tujuan dan Fungsi Hukum Perjanjian.....	56
C. Syarat-Syarat Sah Perjanjian	60
D. Asas Asas Hukum Perjanjian	70
1. Asas Hukum dalam Sistem Hukum.....	70
2. Asas Hukum dalam Hukum Perjanjian	78
3. Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian.....	82
4. Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perjanjian	87
5. Kriteria Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Perjanjian	91
E. Pola Kemitraan dalam Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia	98
1. Pengaturan kemitraan dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.....	98
2. Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia.....	102
3. Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit ..	109
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	119
A. Urgensi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit.....	119
1. Perlindungan Negara Terhadap Masyarakat Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit.....	119
a. Regulasi Di Tingkat Nasional.....	121
b. Regulasi di tingkat daerah di Provinsi Jambi.....	129
2. Urgensi Perjanjian Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	141
3. Urgensi Asas Hukum Dalam Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit.....	144

4. Urgensi Asas Proporsionalitas dalam Pembentukan Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	153
5. Urgensi Asas Proporsionalitas dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	174
6. Substansi Perjanjian Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi	191
B. Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Jambi	206
1. Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi.....	206
a. Perjanjian Perubahan Antara Koperasi Mukti Mandiri dengan PT Muaro Kahuripan Indonesia.....	210
b. Perjanjian Kerja Sama Antara PT Puri Hijau Lestari dengan Koperasi Mekar Jaya	217
c. Perjanjian Kerja Sama Antara PT Produk Sawitindo Jambi dengan Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya	224
d. Perjanjian Kerja Sama Antara Koperasi Mitra Dasal dengan PT Trimitra Lestari	240
e. Perjanjian Kerja Sama Antara KUD Karya Jaya dengan PT Inti Indosawit Subur	261
2. Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO</i>).....	275
a. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Koperasi Agro Tani Lestari dan PT Inti Guna Nabati	282
b. Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Industri Atara Perkumpulan Petani Sawit Rimbo Ulu Pengolahan Kelapa Sawit PT Kurnia Palma Berjaya	288
3. Masalah Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi	295
C. Model Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Proporsional.....	311
1. Rekonstruksi Pengelolaan Perkebunan Sawit Rakyat Melalui Perjanjian	311
2. Model Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Proporsional	328
a. Penguatan Kelembagaan Para Pihak.....	331
b. Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Masyarakat	336
c. Komitmen Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (<i>Sustainable</i>)	342
d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Proporsional	345
e. Keterlibatan Pemerintah dalam Perjanjian	349
f. Kajian Akademik Draft Perjanjian	355
BAB IV PENUTUP	362
A. Kesimpulan.....	362
B. Saran.....	364

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengaturan Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Plasma di Indonesia	5
Tabel 2. Perbandingan Penelitian Sebelumnya.....	26
Tabel 3 Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kriteria Asas Proposional.....	97
Tabel 4 Pengaturan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit.....	122
Tabel 5 Substansi Perjanjian Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit.....	193
Tabel 6 Luas Perkebunan Kelapa sawit di Provinsi Jambi	208
Tabel 7 Jumlah Perusahaan Kelapa sawit di Jambi	209
Tabel 8 Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Sama KSU Pelang Jaya dengan PT PSJ.....	239
Tabel 9 Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Sama KUD Karya Jaya dengan PT IIS.....	274
Tabel 10 <i>Coding</i> Rekapitulasi Implementasi Asas Proporsionalitas pada Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi	304
Tabel 11. Fase Pra Kontrak.....	324
Tabel 12 Permasalahan dalam Perjanjian dan Model Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Proporsional.....	328



ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Ageng Triganda Sayuti

NIM: 2230112014

345 Halaman

Program Studi Doktor Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Andalas

2026

Perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional perlu mengelaborasi tahapan kontraktual dan tahapan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam mengatur hubungan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Kemitraan inti-plasma dalam perkebunan kelapa sawit merupakan instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dalam industri perkebunan kelapa sawit. Dalam praktiknya, perjanjian pengelolaan tersebut kerap menimbulkan ketimpangan relasi hukum dan ekonomi akibat lemahnya posisi tawar petani serta dominannya peran perusahaan dalam proses perancangan dan pelaksanaan kontrak. Dari kenyataan tersebut maka perlu menempatkan asas proporsionalitas sebagai salah satu asas dalam hukum perjanjian untuk diuji implementasinya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang akan dibahas yaitu, Apa urgensi asas proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit? Kemudian bagaimana implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi? Serta bagaimana model perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan gabungan (*mixed research*) yaitu penelitian penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik, dengan menggunakan teori keadilan, teori *law as tool of social engineering*, dan teori perjanjian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa urgensi asas proporsionalitas relevan digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam pembentukan perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Kemudian, Implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi tidak semuanya mengakomodir asas proporsionalitas dalam perjanjian sehingga terdapat persoalan dalam legalitas lahan, posisi tawar masyarakat yang lemah yang berpengaruh terhadap substansi dari isi perjanjian. Terakhir, model perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional perlu mengelaborasi tahapan kontraktual dan tahapan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat dalam perjanjian.

Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Perjanjian, Perkebunan Kelapa Sawit.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN PALM OIL PLANTATION MANAGEMENT AGREEMENTS

Ageng Triganda Sayuti

Nim: 2230112014

Program Studi Doktor Hukum

Universitas Andalas

2026

The management agreement for palm oil plantation is a legal instrument that plays a significant role in regulating the relationship between plantation companies and the community. The nucleus-plasma partnership in palm oil plantations serves as a strategic instrument for national economic development aimed at improving the welfare of farmers in the palm oil industry. In practice, these management agreements often result in imbalances in legal and economic relations due to the farmers' weak bargaining position and the dominant role of companies in the design and implementation of contracts. Given this reality, it is necessary to incorporate the principle of proportionality as one of the principles in contract law, to test its implementation in palm oil plantation management agreements. This study formulates the issues to be discussed, namely, what is the urgency of the principle of proportionality in palm oil plantation management agreements? How is the implementation of the principle of proportionality in palm oil plantation management agreements in Jambi Province? And what would a proportional model of palm oil plantation management agreements look like? This research employs a mixed-method approach, combining legal research with empirical data, using the theories of justice, Law as a Tool of Social Engineering, and contract theory. The findings reveal that the urgency of the principle of proportionality is relevant as a guideline in the formation of palm oil plantation management agreements. Furthermore, the implementation of the principle of proportionality in Jambi Province's palm oil estate management agreements does not fully accommodate this principle, resulting in issues regarding land legality and the weak bargaining position of the community, which affects the substantive content of the agreements. Finally, a proportional model for palm oil estate management agreements needs to elaborate on the contractual stages and the development stages of palm oil plantations by enhancing local community involvement and internalizing the values of local wisdom that exist and evolve within the community in the agreement.

Keywords: Principle of Proportionality, Agreement, Palm Oil Plantation.